



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.143, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Republik Indonesia.
Republik Makedonia. Pembebasan Visa. Paspor
Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN

ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK MAKEDONIA TENTANG PEMBEBASAN VISA
KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF MACEDONIA ON EXEMPTION OF VISA
REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Skopje, Makedonia, pada tanggal 28 September 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Makedonia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Macedonia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Makedonia;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MAKEDONIA TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Makedonia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Macedonia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 September 2007 di Skopje, Makedonia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Makedonia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Makedonia, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK MAKEDONIA
TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT
BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Makedonia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

MENIMBANG hubungan baik antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk lebih memperkuat hubungan, dengan dasar timbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan dinas Indonesia dan Makedonia ke dalam wilayah negara masing-masing;

BERDASARKAN hukum dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL I
PEMBEBASAN VISA

Pemegang paspor diplomatik atau dinas yang masih berlaku dibebaskan dari persyaratan visa masuk, transit, tinggal di wilayah Negara Pihak lain untuk masa waktu tidak lebih dari tiga puluh (30) hari terhitung dari tanggal masuk.

PASAL II
PERSYARATAN VISA

Dalam hal penugasan, warga dari masing-masing pihak yang memegang paspor diplomatik atau dinas yang masih berlaku dan anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah pihak lain, begitu juga dengan pasangan dan anak yang belum bekerja berusia dibawah 25 tahun untuk pihak Indonesia, dan berusia dibawah 26 tahun untuk pihak Makedonia, yang termasuk dalam rumah tangga, diwajibkan untuk mendapatkan visa masuk dari Kedutaan Besar dari pihak lainnya sebelum memasuki negara salah satu pihak.

PASAL III
KEDATANGAN ATAU KEBERANGKATAN PADA PERBATASAN

Warga negara masing-masing pihak dari Pasal 1 dan 2 dapat memasuki dan keluar wilayah Pihak lain melalui perbatasan yang terbuka bagi penumpang internasional, dengan mematuhi hukum dan perundang-undangan Negara Pihak lain yang bersangkutan mengenai prosedur masuk, perjalanan dan tinggal bagi orang asing.

PASAL IV
PERTUKARAN INFORMASI

Para pihak akan menginformasikan satu sama lain secepatnya tentang perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan di masing-masing negaranya mengenai prosedur masuk, perjalanan dan tinggal bagi orang asing.

PASAL V
KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Persetujuan ini tidak mempengaruhi kewajiban negara masing-masing pihak untuk tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang ditetapkan di wilayah negara pihak lain.

PASAL VI
HAK-HAK PIHAK BERWENANG

Persetujuan ini tidak mempengaruhi hak Pihak-Pihak berwenang untuk menolak masuk atau tinggal di wilayahnya bagi pemilik paspor diplomatik atau dinas pihak lain dari pasal 1 dan 2 jika mereka dipertimbangkan sebagai tidak diinginkan atau "dikhawatirkan akan membahayakan perdamaian umum, ketertiban umum, kesehatan umum atau keamanan nasional."

PASAL VII
SPESIMEN PASPOR

1. Dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, Para Pihak akan saling menyampaikan melalui saluran diplomatik, contoh paspor diplomatik dan dinas serta informasi mengenai spesimen paspor diplomatik dan dinas yang berlaku.
2. Jika terdapat paspor diplomatik atau dinas baru atau modifikasi dari yang lama, para pihak akan menyampaikan spesimennya melalui saluran diplomatik, dalam waktu 30 hari setelah pemberlakuannya.

PASAL VIII
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor bagi warga negara masing-masing Pihak setidaknya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lain.

**PASAL IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala bentuk perselisihan yang timbul akibat interpretasi atau implementasi persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara para pihak melalui saluran diplomatik.

**PASAL X
AMANDEMEN**

Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi, apabila dipandang perlu, melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh kedua Pihak. Amandemen atau revisi tersebut akan berlaku berdasarkan tanggal yang ditentukan oleh para pihak.

**PASAL XI
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN TERMINASI**

1. Persetujuan ini akan berlaku 30 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan nasional bagi berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini akan tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis selama jangka waktu 5 tahun berikutnya, dengan kesepakatan bersama secara tertulis.
3. Masing-masing pihak dapat memberhentikan persetujuan ini dengan memberikan kepada pihak lain sebuah pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberhentian.

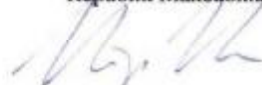
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Skopje pada hari ke duapuluh delapan bulan September tahun dua ribu tujuh, dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Makedonia dan Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia


EDDI HARIYADHI
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa,
Departemen Luar Negeri

Untuk Pemerintah
Republik Makedonia


IGOR ILIEVSKI
Sekretaris Negara
Kementerian Luar Negeri

ДОГОВОР
МЕЃУ
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА
И
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА
МЕЃУСЕБНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗНИОТ РЕЖИМ ЗА НОСИТЕЛИ
НА ДИПЛОМАТСКИ И СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ

Владата на Република Индонезија и Владата на Република Македонија (во понатамошниот текст: „Страните“),

ИМАЈЌИ ГИ ПРЕДВИД пријателските односи меѓу двете земји;

СО ЖЕЛБА за натамошно зајакнување на ваквите односи врз основа на реципроцитет, преку олеснување на влезот во нивните почитувани земји за носителите на дипломатски и службени пасоши на Индонезија и Македонија;

СОГЛАСНО важечките закони и прописи на почитуваните земји,

СЕ ДОГОВОРИЈА за следното:

ЧЛЕН 1

УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ

Државјаните на Страните кои се носители на важечки дипломатски или службени пасоши можат без виза да остварат влез, да транзитираат и да престојуваат на територијата на другата Страна за период не подолг од 30 (триесет) дена од денот на влегувањето.

ЧЛЕН 2**БАРАЊЕ ЗА ВИЗА**

Во случај на упатување за вршење на служба, државјаните на Страните кои се носители на важечки дипломатски или службени пасоши и кои се членови на дипломатско или конзуларно претставништво со седиште на територијата на другата Страна, како и нивните сопружници и деца кои сеуште не работат, а се на возраст до 26 години за македонската страна, односно на возраст до 25 години за индонезиската страна и живеат со нив во заедничко домаќинство, поднесуваат барање за добивање соодветна виза за влез од Амбасадата на другата Страна пред остварување на првото влегување.

ЧЛЕН 3**ПРИСТИГНУВАЊЕ ИЛИ ЗАМИНУВАЊЕ ПРЕКУ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН**

Државјаните на Страните од член 1 и член 2 можат да влезат во или да ја напуштат територијата на другата Страна преку било кој граничен премин кој е отворен за меѓународен сообраќај на патници, доколку ги задоволуваат барањата согласно законите и правните прописи на таа Страна кои се однесуваат на влезот, движењето и престојот на странци.

ЧЛЕН 4**РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ**

Страните, веднаш ќе се информираат за било каква промена во своите закони или правни прописи кои се однесуваат на влезот, движењето и престојот на странци.

ЧЛЕН 5**ОБВРСКА НА ДРЖАВЈАНИТЕ**

Овој Договор не влијае на обврската на државјаните на Страните да се придржуваат кон законите и правните прописи кои се во сила на територијата на другата Страна.

ЧЛЕН 6**ПРАВО НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ**

Овој Договор не влијае на правото на надлежните органи на Страните да забранат влез во или престој на својата територија на носители на дипломатски или службени пасоши од другата Страна наведени во член 1 и член 2 доколку истите ги сметаат за непожелни или доколку сметаат дека истите претставуваат закана за јавниот ред и мир, јавното здравје или националната безбедност.

ЧЛЕН 7**СПЕЦИМЕНИ НА ПАСОШИ**

1. Страните, по дипломатски пат, ќе разменат специмени на важечките дипломатски и службени пасоши најмалку триесет (30) дена пред влегувањето во сила на овој Договор.
2. Во случај на воведување на нови дипломатски или службени пасоши или промена на постоечките, Страните по дипломатски пат ќе достават специмени од истите, најмалку 30 (триесет) дена пред нивното влегување во употреба.

ЧЛЕН 8**ТРАЕЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ПАСОШИТЕ**

Траењето на важноста на пасошите на државјаните на Страните ќе биде најмалку 6 (шест) месеци пред остварувањето на влегувањето на територијата на другата Страна.

ЧЛЕН 9**РЕШАВАЊЕ НА НЕДОРАЗБИРАЊА**

Секое недоразбирање кое произлегува од толкувањето или примената на овој Договор ќе биде решено пријателски преку консултации или преговори меѓу Страните по дипломатски пат.

ЧЛЕН 10**ДОПОЛНУВАЊА**

Овој Договор може да биде изменет или дополнет, доколку се смета за неопходно, со заемна писмена согласност на Страните. Ваквата измена или дополнување ќе влезе во сила на датум определен од Страните.

ЧЛЕН 11**ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА, ТРАЕЊЕ И РАСКИНУВАЊЕ**

1. Овој Договор ќе влезе во сила 30 (триесет) дена од денот на приемот на последното известување со кое Страните се известуваат, по дипломатски пат, дека се исполнети сите предуслови предвидени со нивните национални законодавства за влегување во сила на Договорот.
2. Овој Договор останува во сила за период од 5 (пет) години и може да се обнови за дополнителни 5 (пет) години со заемна писмена согласност на Страните.
3. Секоја Страна може да го раскине овој Договор со доставување на писмено известување за раскинувањето до другата Страна, по дипломатски пат, 30 (триесет) дена пред датумот на раскинувањето.

ВО ЛИЧНО ПРИСУСТВО, долупотпишаните, должно овластени од нивните Влади, го потпишаа овој Договор.

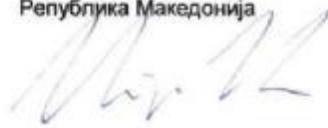
СОСТАВЕНО во Скопје на 28 септември 2007 година во два оригинални примерока, секој на индонезиски, македонски и англиски јазик, при што сите текстови се подеднакво автентични. Во случај на несогласување во толкувањето, ќе преовлада текстот на англиски јазик.

За Владата на
Република Индонезија



Eddi Hariyadhi
Генерален директор
за Американски и Европски работи
Министерство за надворешни работи

За Владата на
Република Македонија



Игор Илиевски
Државен секретар
Министерство
за надворешни работи

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
ON
EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Macedonia, hereinafter referred to as "the Parties",

CONSIDERING the friendly relations between the two countries;

DESIRING to further strengthen such relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of holders of diplomatic or service passports of Indonesia and Macedonia to their respective countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I
VISA EXEMPTION

Citizens of either Party who are holders of a valid diplomatic or service passport shall not be required to obtain a visa to enter, transit, and stay in the territory of the other Party for a period not exceeding 30 (thirty) days from the date of entry.

ARTICLE II
VISA REQUIREMENT

In the case of assignment, citizens of either Party who are holders of a valid diplomatic or service passport and are members of a diplomatic mission or a consular post on the territory of the other Party, as well as their spouse and unmarried children who have not worked yet under the age of 25 years for the Indonesian side, and the age of 26 years for the Macedonian side, forming part of their household, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to the entry.

**ARTICLE III
ARRIVAL OR DEPARTURE AT BORDER CROSSING**

Citizens of the Parties from Article 1 and 2 may enter or leave the territory of the other Party at any border crossing open for international passenger traffic, provided that they meet the requirements of laws and regulations of that Party governing the entry, movement and sojourn of foreigners.

**ARTICLE IV
EXCHANGE OF INFORMATION**

The Parties shall inform each other immediately on any changes in their respective laws and regulations governing the entry, movement and sojourn of foreigners.

**ARTICLE V
OBLIGATION OF NATIONALS**

This Agreement does not affect the obligation of nationals of either Party to abide by the laws and regulations currently in force in the territory of the other Party.

**ARTICLE VI
THE RIGHT OF AUTHORITIES**

This Agreement does not affect the right of the competent authorities of the Parties to refuse permission to enter or stay in its territory to holders of a diplomatic or service passport of the other Party from Articles 1 and 2 if they consider them undesirable "or likely to endanger the public peace, public order, public health or national security".

**ARTICLE VII
SPECIMENS OF PASSPORTS**

1. The Parties shall convey to each other, through diplomatic channels, specimens of valid diplomatic and service passports at least thirty (30) days prior to entry into force of this Agreement.
2. In case of introduction of new diplomatic or service passports or modification of the existing ones, the Parties shall convey to each other, through diplomatic channels, their specimens, at least thirty (30) days prior to their application.

**ARTICLE VIII
DURATIONS OF PASSPORT VALIDITY**

The duration of Passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.

**ARTICLE IX
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

**ARTICLE X
AMENDMENT**

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing by the Parties. Such amendment or revision shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties.

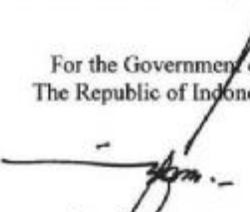
**ARTICLE XI
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the day the receipt of last notification in which the Parties have informed each other through diplomatic channels that all the requirements for entry into force of the Agreement as stipulated by their respective national legislation have been met.
2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and may be renewed for another five (5) years by mutual consent in writing.
3. Either Party may terminate this Agreement by giving to the other party a written notice of termination, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to intended date of termination.

IN WITNESS WHERE OF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at Skopje on this twenty-eighth day of September in the year two thousand and seven in the Indonesian, Macedonian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
The Republic of Indonesia


EDDI HARIYADI
Director General for
American and European Affairs,
Ministry of Foreign Affairs

For the Government of
The Republic of Macedonia


IGOR ILIEVSKI
State Secretary,
Ministry of Foreign Affairs



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
REPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Министар / Minister

FULL POWERS

I, Antonio Milošoski, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia,

HEREBY AUTHORIZE Mr. Igor Ilievski, State Secretary in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, to sign, on behalf of the Government of the Republic of Macedonia, the Agreement between the Government of Republic of Macedonia and the Government of the Republic of Indonesia on mutual exemption of visa requirements for holders of diplomatic and service passports.

In witness where of, this Full Powers is issued to Mr. Igor Ilievski.

Done in Skopje, on September 20, 2007.



[Signature]
ANTONIO MILOŠOSKI